

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia, maka sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, pemerintahan wajib melakukan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah yang telah dicapai pada periode waktu tertentu. Dengan adanya kewajiban pertanggungjawaban tersebut maka mengharuskan setiap lembaga, badan maupun institusi pemerintahan menyampaikan informasi atas aktivitas, kinerja serta pencapaian dalam periode waktu tertentu kepada pihak publik dan juga hal tersebut merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah maka bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah dengan menyajikan laporan keuangan. Hal ini diatur dalam UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 tahun 2010 yang memuat tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), disebutkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus disajikan dan disusun sesuai dengan SAP. Adapun informasi yang termuat dalam LKPP dan LKPD diharapkan dapat bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan. Pengguna laporan keuangan meliputi beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman, serta pemerintahan itu sendiri.

Didalam PP No. 71 tahun 2010, terdapat karakteristik kualitatif laporan keuangan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi, sehingga dapat memenuhi tujuannya atau menghasilkan informasi yang berkualitas. Laporan keuangan dapat dinyatakan berkualitas apabila telah memenuhi prasyarat normatif yang terdiri atas keempat karakteristik yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Untuk dapat memenuhi karakteristik kualitatif tersebut, maka pengelolaan dan pelaporan atas keuangan di suatu pemerintah daerah tidak terlepas dari berbagai macam faktor yang mempengaruhi. Salah satu faktor yang berperan dalam pemenuhan karakteristik kualitatif tersebut adalah Sumber Daya Manusia (SDM).

SDM yang berkompeten diharapkan dapat melaksanakan tata kelola dan pelaporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan didalam SAP. SDM tersebut harus memiliki kapasitas yang mumpuni untuk bertindak sebagai pelaksana, pengelola serta pelaporan keuangan pemerintah daerah. Yang dimaksud dengan kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan yang terdapat pada diri seseorang, hal tersebut meliputi tingkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang memadai dalam menyelesaikan tugas ataupun tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Kapasitas sumber daya manusia dapat dilihat dari tingkat tanggungjawab yang diberikan kepadanya, yang mana tanggungjawab tersebut diuraikan di dalam deskripsi jabatan (Primayana, 2014).

Selain kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi juga memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal tersebut terlihat dari hasil penelitian Indriani (2016) yang menyebutkan bahwa, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi akan meningkatkan kualitas dari LKPD. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah telah diatur dalam PP No. 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Terdapat penjelasan bahwa pemerintah meliputi pusat dan daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan

memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik.

Selain wajib untuk memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang memadai juga sangat diperlukan. Berdasarkan PP No. 60 tahun 2008 sistem pengendalian intern didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Kemudian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam PP No. 60 tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri atas beberapa unsur, diantaranya: lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan pengendalian intern. Kemudian seluruh proses kegiatan audit, *review*, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik disebut dengan Pengawasan Intern.

Pengawasan intern dalam sistem pengendalian internal pemerintah diarahkan antara lain untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mewujudkan integrasi kebijakan pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pembinaan aparat pengawas internal pemerintah harus dilakukan secara terus-

menerus (*series of actions and on going basis*). Disamping itu, diperlukan perubahan pola pikir (*mind set*) aparat pengawas internal pemerintah sebagai pemberi peringatan dini (*early warning*) terhadap temuan pelanggaran atau penyimpangan yang berindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (Armando, 2013).

Menurut perubahan ketiga UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, pada bab IIIA pasal 23E institusi atau badan yang dibentuk kemudian diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pemerintah dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara dan lembaga-lembaga negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selanjutnya tugas dan kewenangan BPK diatur dalam Undang-Undang No 15 tahun 2006 tentang BPK pada Bab III (www.bpk.go.id). Berikut ini grafik yang diperoleh dari situs resmi BPK perwakilan provinsi Lampung, mengenai status Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Lampung Utara rentang tahun 2011 – 2016.



**Gambar 1.1 Grafik LHP LKPD pada
Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara**

Berdasarkan dari grafik diatas, hasil opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2011 memperoleh Laporan hasil

pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yaitu Wajar Dengan Pengecualian (WDP), berikutnya di tahun 2012 dan 2013, menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara memperoleh LHP LKPD yaitu Tidak Wajar (TW). Kemudian di tahun 2014 berhasil meningkatkan kembali opini atas LHP LKPD menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Selanjutnya selama 2 tahun berturut-turut di tahun 2015 dan 2016 peningkatan status LHP LKPD memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Terbaru berdasarkan rilis berita di portal media teraslampung.com Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara kembali meraih predikat WTP untuk LHP LKPD pada tahun 2017. Peningkatan penilaian atas LHP LKPD ini yang menjadikan dasar peneliti ingin mengkaji lebih jauh indikator yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan Kabupaten Lampung Utara dimana penilaian atas LHP LKPD saat ini memperoleh opini yang baik.

Indriani (2016) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu. Adapun hasil penelitiannya menyebutkan bahwa kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, serta pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern pemerintah maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tersebut.

Penelitian sejenis juga dilakukan oleh Andrianto (2017) yaitu dengan judul penelitian Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi studi empiris pada satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Sleman. Adapun hasil penelitiannya ketiga variabel independen yaitu Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah. Namun Komitmen Organisasi sebagai variabel moderasi tidak dapat memperkuat pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Kemudian Ningrum (2018) yang melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen. Hasil penelitiannya menyimpulkan kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, namun sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Indriani (2016), Andrianto (2017), serta penelitian yang dilakukan oleh Ningrum (2018). Perbedaan penelitian ini dengan ketiga penelitian sebelumnya adalah dalam penggunaan sampel, bila sebelumnya penelitian meneliti pada Pemerintah Daerah Kota Bengkulu, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Sleman, maka penelitian kali ini meneliti sampel dari OPD Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara. Dalam penelitian ini juga menghilangkan variabel moderasi di penelitian sebelumnya (Andrianto, 2017) yaitu komitmen organisasi.

Berdasarkan uraian di atas, topik tersebut menarik untuk dijadikan sebagai judul penelitian dan menjadikan penelitian Indriani (2016), Andrianto (2017) dan Ningrum (2018) sebagai rujukan. Maka judul dari penelitian ini adalah: **“Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi empiris Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Lampung Utara)”**.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan belakang dan identifikasi masalah di atas, penelitian ini tidak dilakukan pada proses pelaporan keuangan, namun ruang lingkup dan batasan masalah dalam penelitian ini hanya terbatas pada pengujian terhadap tiga faktor yang diduga mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yaitu kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019 dengan mengambil sampel pada pegawai bagian akuntansi dan keuangan di masing-masing OPD yang ada di Kabupaten Lampung utara untuk mengisi kuesioner. Kuesioner akan diberikan secara bertahap kepada seluruh pegawai yang terlibat secara langsung dalam proses pengelolaan, pembuatan dan pelaporan keuangan.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Kapasitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
2. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
3. Apakah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris:

1. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis agar dapat mengasah kemampuan berpikir secara ilmiah dalam membandingkan teori-teori yang didapatkan selama mengikuti masa perkuliahan dengan penerapan yang dilakukan dalam sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan oleh pemerintah daerah.

2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran serta masukan yang berguna bagi pemerintah, tentang bagaimana mengelola dan memanfaatkan bahan informasi yang telah diperoleh, untuk dapat diaplikasikan dalam memperbaiki Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah melalui faktor-faktor seperti Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sehingga dapat mewujudkan tata kelola dan penyelenggaraan pemerintah yang bersih, bertanggungjawab dan transparan.

3. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan juga informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang sejenis, serta menambah literatur perpustakaan sehingga dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi pemaparan mengenai latar belakang, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan serta manfaat penelitian kemudian yang terakhir yaitu sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini memuat tentang berbagai teori-teori pendukung penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Apabila penelitian memerlukan analisa statistika maka pada bab ini akan dicantumkan juga teori statistika yang digunakan dan hipotesa.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi metode-metode pendekatan penyelesaian permasalahan yang dinyatakan dalam perumusan masalah.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan mendemonstrasikan pengetahuan akademis yang dimiliki dan ketajaman daya pikirnya dalam menganalisis persoalan yang dibahas dengan berpedoman pada teori-teori yang dikemukakan pada BAB II sebelumnya. Kemudian penulis akan mengemukakan suatu gagasan/rancangan/model/alat/teori baru untuk memecahkan masalah yang dibahas sesuai dengan tujuan penelitian.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi rangkuman akhir dari pembahasan yang terdiri dari; (1) jawaban atas perumusan masalah dan tujuan penelitian serta hipotesis, (2) hal baru yang ditemukan dan prospek temuan, kemudian (3) pemaknaan teoritik dari hal baru pengembangan ilmu pengetahuan dan penggunaan praktis. Memberi saran yang merupakan implikasi hasil penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan penggunaan praktis yang sekurang-kurangnya memberi saran atas objek penelitian yang dilakukan.